Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 6, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ANALISIS PERAN AKTOR DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA BARU

Diah Anggraini[1], Siti Maidina Herdiyanti[2], Glwadie O Nouvel[3]

[1] Agribisnis, Fakultas Pertanian, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Sarolangun

[23] Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Oktober 2026
Revised Oktober 2026
Accepted Oktober 2026
Available Oktober 2026

emailpenulis
semuaditulis@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan merupakan salah satu kebijakan strategis dan mega proyek nasional yang memiliki dimensi politik, ekonomi, sosial, dan pembangunan wilayah. Gagasan pemindahan ibu kota negara bukan merupakan wacana baru dalam sejarah Indonesia, karena telah muncul sejak masa kolonial hingga pemerintahan beberapa presiden, namun belum pernah berhasil direalisasikan. Momentum baru muncul pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang secara resmi menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2019. Pemerintah menetapkan wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara baru. Berbeda dengan wacana pada periode pemerintahan sebelumnya, kebijakan pemindahan ibu kota pada era Joko Widodo mulai memasuki tahap konkret melalui penyusunan regulasi, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan pembangunan infrastruktur. Proses tersebut melibatkan berbagai aktor negara maupun non-negara dengan kepentingan dan peran yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara serta menganalisis peran dan kepentingan masing-masing aktor dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dan penelusuran berbagai sumber terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif analisis aktor kebijakan untuk memetakan posisi, kepentingan, pengaruh, dan peran masing-masing aktor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konfigurasi aktor dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara serta menjelaskan dinamika hubungan antaraktor dalam proses kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara.

Kata Kunci: Aktor Kebijakan, Kebijakan Publik, Kepentingan, Ibu Kota Negara, Pemindahan Ibu Kota Negara.

A B S T R A C T

The plan to relocate Indonesia's capital city from Jakarta to Kalimantan represents one of the country's most strategic national policies and largest development projects, encompassing political, economic, social, and regional development dimensions. The idea of relocating the capital is not new in Indonesia, as similar proposals had emerged from the colonial period through several presidential administrations but had never been successfully implemented. A new momentum emerged during the administration of President Joko Widodo, who formally announced the plan to relocate the national capital in his State of the Union Address on August 16, 2019. The government designated areas in Penajam Paser Utara and Kutai Kartanegara, East Kalimantan, as the location for the development of the new capital city. Unlike previous

proposals, the capital relocation policy under President Joko Widodo entered a more concrete stage through regulatory development, strategic planning, budget allocation, and infrastructure preparation. The process involved various state and non-state actors with different interests and roles. This study aims to identify the actors involved in the capital relocation policy and analyze their respective roles and interests in the formulation and implementation of the policy. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through documentary research and an examination of relevant sources concerning the capital relocation policy. The analysis applies a policy actor analysis perspective to map the position, interests, influence, and roles of the actors involved. This study is expected to provide a comprehensive understanding of the configuration of actors involved in Indonesia's capital relocation policy and to explain the dynamics of inter-actor relations in the formulation and implementation of the policy.

***Keywords**: capital relocation, interests, new capital city, policy actors, public policy.*

1. PENDAHULUAN

Rencana pemindahan ibu kota negara baru pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan pada Jumat, 16 Agustus 2019 di hadapan para wakil rakyat dan publik, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo secara terbuka meminta izin untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dengan menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara baru ini bukan hanya sebagai simbol identitas melainkan sebagai representasi kemajuan bangsa demi pemerataan dan keadilan ekonomi Indonesia.

Mengutip Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan, "Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan" (Haryanti & Wedhaswary, 2019). Adanya mandat ini menjadikan rencana pemindahan ibu kota negara baru Indonesia menjadi salah satu mega proyek yang menuai respon positif dan negatif antar elite dan masyarakat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Lokasi ibu kota negara baru sendiri diketahui akan dibangun di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota negara baru ini akan menggunakan total lahan kawasan seluas 256.142,74 hektare dimana kawasan pusat ibu kota akan dibangun di atas lahan seluas 56.189,87 hektare. Pemerintah telah menjelaskan bahwa pemilihan lokasi ibu kota negara baru ke Provinsi Kalimantan Timur telah didasarkan pada manajaemen risiko benaca alam yang rendah atau relatif alam, termasuk secara geografis dinilai berada di tengah-tengah Indonesia.

Sejatinya rencana pemindahan ibu kota negara sudah ada sejak zaman kolonial yakni pada masa Herman Willem Daendels dan J.P Graaf van Limburg Stirum yang ingin memindahkan Ibu Kota Batavia ke Surabaya dan Bandung. Pada era Presiden Soekarno, Palangkaraya adalah lokasi yang dinilai ideal untuk dicanangkan sebagai ibu kota negara selain Jakarta. Pada era Presiden Soeharto muncul gagasan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid diketahui ditetapkan tiga titik strategis yang dijadikan sebagai dasar pengembangan yaitu di Aceh, Kalimantan dan Pulau Biak. Sementara, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) wacana pemindahan ibu kota negara tidak secara kongkrit muncul, meskipun diketahui Presiden SBY menyetujui gagasan Presiden Soekarno, termasuk sempat muncul gagasan Purwekerto sebagai tujuan ibu kota negara baru. Sedangkan, dalam masa Presiden Joko Widodo sendiri diketahui pada tahun 2017 isu pemindahan ibu kota negara menjadi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



perbincangan publik dan Kota Panajem Paser Utara terpilih menjadi calon ibu kota negara baru. Namun sejumlah wacana dari setiap era Presiden diatas belum pernah berhasil direalisasikan.[1]

Selanjutnya, sejak dua tahun lalu dari tahun 2019, rencana pemindahan ibu kota negara baru dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah mulai diwujudkan mulai dari tahapan persiapan, analisis dampak pemindahan ibu kota negara, payung hukum atau regulasi, alokasi anggaran, hingga kini tengah digadang persiapan pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung di Kalimantan Timur meskipun Indonesia masih berada di situasi darurat pandemi Covid-19. Bahkan, wacana terbaru saat ini, pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota negara baru dari Jakarta ke Kalimantan sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang. Adanya sejumlah langkah kongkrit dalam upaya pemindahan ibu kota negara baru saat ini, maka menjadi menarik bagi penulis untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat beserta perannya.

Berangkat dari uraian diatas maka penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana peran aktor dalam pemindahan ibu kota negara baru khususnya dari sisi eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil? Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut tujuan penelitian pertama, menganalisis peran aktor eksekutif dalam proses pemindahan ibu kota negara baru, khususnya dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, penyusunan regulasi, serta implementasi kebijakan pemindahan ibu kota negara. Kedua, menganalisis peran aktor legislatif dalam proses pemindahan ibu kota negara, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara. Ketiga, menganalisis peran masyarakat sipil dalam proses pemindahan ibu kota negara, termasuk bentuk partisipasi, dukungan, kritik, advokasi, serta respons terhadap kebijakan dan proses pembangunan ibu kota negara baru. Kemudian menganalisis hubungan dan interaksi antara aktor eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pemindahan ibu kota negara, sehingga dapat diketahui bagaimana masing-masing aktor memengaruhi proses kebijakan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai pemindahan ibu kota negara di Indonesia telah berkembang dalam berbagai perspektif. Sejumlah penelitian terdahulu membahas pemindahan ibu kota dari perspektif pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, tata ruang, lingkungan, kesiapan infrastruktur, serta aspek hukum dan kelembagaan. Penelitian lainnya juga mengkaji pemindahan ibu kota sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional dan strategi pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan **aktor sebagai unit analisis utama dalam proses kebijakan pemindahan ibu kota negara** masih relatif terbatas.

Keterbatasan kajian mengenai pemindahan Ibu Kota Negara terutama terlihat pada belum banyaknya kajian yang secara sistematis membandingkan **peran aktor eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil** dalam satu kerangka analisis. Kajian mengenai pemerintah cenderung menempatkan aktor eksekutif sebagai pelaksana kebijakan tanpa menguraikan secara mendalam bagaimana aktor tersebut membangun agenda, memobilisasi dukungan, dan memengaruhi proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, peran legislatif dalam proses pemindahan ibu kota sering kali lebih banyak dibahas dalam konteks pembentukan regulasi, sementara fungsi representasi,

[1] https://www.its.ac.id/news/2021/10/20/kilas-balik-wacana-pemindahan-ibukota/

*Corresponding author
E-mail addresses: diah.ditara88@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



pengawasan, dan negosiasi kepentingan dalam proses kebijakan belum banyak dianalisis secara mendalam. Demikian pula, masyarakat sipil sering ditempatkan sebagai pihak yang menerima dampak kebijakan, sementara perannya sebagai aktor yang dapat memberikan dukungan, kritik, tekanan, maupun memengaruhi legitimasi kebijakan belum memperoleh perhatian yang proporsional.

Pembahasan mengenai perpindahan Ibu Kota Negara sudah banyak dibahas sebelumnnya, namun artikel yang menjelaskan mengenai aktor yang mempengaruhi kebijakan perpidahan Ibu Kota Negara belum banyak dibahas secara keseluruhan. Dalam tinjauan pustaka ini akan dijabarkan 3 subagian: 1.Aktor dan Proses Kebijakan Publik 2.Relasi dan Interaksi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik 3. Dinamika Aktor dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Aktor dan Proses Kebijakan Publik

Seperti yang telah dijabbarkan pada uraian pendahuluan bahwa isu pemindahan Ibu Kota Negara sudah muncul dari beberapa Rezim politik sebelumnya. Namun pada Rezim Presiden Joko Widodo isu ini benar-benar direalisasikan. Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, artikel ini mengunakan teori mengenai Model Elite yang dikemukakan oleh Dye (2017). Dye (2017) menafsirkan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai beberapa aspek dari kenyataan di lapangan.[2] Penyederhanaan sistem masalah dalam model kebijakan dilakukan untuk membantu mengurangi kompleksitas sehingga dapat kebijakan dapat dianalisis dengan lebih mudah. Dalam penggunaanya, model kebijakan publik dapat dipahami sebagai berikut[3]:

1. Untuk meringkas dan memperjelas pemikiran mengenai kebijakan
2. Untuk dapat mengidentifikasi aspek penting dalam masalah kebijakan
3. Untuk membantu mengkomunikasikan bagian esensial dari kebijakan
4. Untuk dapat mengkalisfikasikan penting-tidak pentingnya sebuah masukan
5. Untuk dapat menjelaskan kebijkan serta memprediksi konseuensi dari kebijakan.

Thomas Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy* menjelaskan bahwa terdapat delapan bentuk model kebijakan publik. Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam artikel ini maka, digunakan proposisi Model Kebijakan Elite. Model Elit yakni kebijakan politik yang dirumuskan merupakan preferensi dari segelintir elit politik. Model elite ini dilandasi asumsi bahwa terdapat dua kelompok yang berkembang di masyarakat, yakni Kelompok Pemegang Kekuasaan (Elite) dan Kelompok yang Tidak Memiliki Kekuasaan (Massa). Adapun dalam menggambarkan hubungan elite dan massa disini, Dye (2017) menggambarkan Elite adalah mereka yang memerintah kemudian memiliki starta sosial ekonomi atas. Kemudian, massa digambarkan sebagai mereka yang tidak memiliki kekuasan di pemerintahan. Kebijakan Publik yang dibentuk tidak mencerminkan tuntutan masa, melaikan prefensi, minat dan nilai dari pilihan elite yang berkuasa. Namun, bukan berarti bahwa produk kebijakan dengan preferensi elite ini selalu bertentangan dengan kesejahteraan rakyat, melainkan persoalan kesejahteraan rakyat berada pada pundak elite bukan pada massa. Berikut beberapa indikator dari Model Elite[4] antara lain:

1. Preferensi politik para elite
2. Kebijakan Top-Down

[2] Thomas Dye, 2017. Understanding Public Policy. Florida State University. Hal. 9
[3] Ibid. Dye. Hal. 10
[4] Yulianto Kadji, 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Hal. 33

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



3. Adanya administrator publik sebagai implementator kebijakan
4. Konservatif dan status quo

Dalam melihat elite yang berperan dalam pemindahan ibu kota negara terdapat beberapa elite yang akan disoroti, yakni aktor eksekutif (pemerintah), aktor legislatif (DPR) dan aktor masyarakat sipil (*civil society)*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Satriawan & Syamsuri, (2023) menitik beratkan pada kemauan politik dari Presiden Joko Widodo yang pada saat itu menjabat sebagai presiden aktif. Artikel yang coba penulis lakukan mencoba menganalisis aktor siapa saja yang mendorong kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara terjadi.
Penelitian yang dilakukan oleh Satriawan & Syamsuri, (2023) menegaskan bahwa yang melatar belakangi perpindahan Ibu Kota Negara adalah kuatnya *political will* yang dimiliki Presiden Joko Widodo yang menilai bahwa Jakarta bukan lagi daerah yang kondusif sebagai Ibu Kota Negara. Dalam mewujudkan *political will* Presiden Joko Widodo mengakomodir 10 peraturan pemerintah sehingga perpindahan Ibu Kota Negara dapat terwujud.

Dengan demikian, terdapat *research gap* pada aspek aktor dan relasi antaraktor (*actor-centered approach*) dalam proses kebijakan pemindahan ibu kota negara. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana aktor eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil menjalankan perannya, membangun kepentingan, serta berinteraksi dalam proses pemindahan ibu kota negara. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika politik dan proses kebijakan di balik pemindahan ibu kota negara, tidak hanya sebagai proyek pembangunan fisik, tetapi juga sebagai proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan dan aktor.

Relasi dan Interaksi Aktor dalam Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan publik terkait pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan wujud dari dinamika politik kelembagaan (*institutionalism*) dan konstelasi politik yang kompleks (Satriawan & Syamsuri, 2023). Penelaahan terhadap proses ini memperlihatkan bagaimana interaksi antar-aktor eksekutif dan legislatif membentuk alur pembuatan keputusan strategis dalam waktu yang relatif singkat(Khairunnisa & Kunci, n.d.).

Kebijakan pemindahan IKN tidak terlepas dari peran *individual factor*, yakni keyakinan, dorongan, dan keberanian politik (*political will*) Presiden Joko Widodo (Satriawan & Syamsuri, 2023). Secara konseptual, keberadaan *political will* dari pimpinan negara merupakan kunci utama dalam mengeksekusi kebijakan jangka panjang yang memiliki dampak nasional yang besar (Satriawan & Syamsuri, 2023). Keberanian politik ini dilandasi oleh argumen empiris mengenai beban ekologis dan kependudukan DKI Jakarta yang telah melampaui daya dukungnya, serta urgensi mewujudkan pemerataan ekonomi berparadigma Indonesia-sentris (Utama Erry Praditya, 2024). Dalam mengeksekusi kebijakan ini, eksekutif membentuk *organizational factors* berupa Tim Transisi dan Otorita IKN yang mengonsolidasikan kementerian/lembaga teknis serta merancang skema pendanaan multi-pilar APBN, KPBU, dan investasi swasta/BUMD (Satriawan & Syamsuri, 2023). Selain itu, eksekutif menggalang jaringan *relational factors* internasional dengan menunjuk dewan pengarah (*steering board*) dunia guna memperkuat legitimasi global dan kepercayaan investor (Satriawan & Syamsuri, 2023).

*Corresponding author
E-mail addresses: diah.ditara88@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Proses pengesahan UU No. 3 Tahun 2022 berlangsung sangat cepat di parlemen, yakni hanya membutuhkan waktu sekitar 17 hingga 43 hari kerja (Khairunnisa & Kunci, n.d.). Kecepatan legislasi ini dipengaruhi oleh perubahan pola pembagian kekuasaan (*power sharing*) Presiden dari *victory game* (membagi kekuasaan terbatas pada partai pengusung) menjadi *reciprocity game* (merangkul mantan rival politik dan partai non-pengusung ke dalam kabinet) (Khairunnisa & Kunci, n.d.). Penerapan konfigurasi kekuasaan koalisional ini menciptakan fenomena kartelisasi politik yang memfasilitasi persetujuan mayoritas di DPR RI (Khairunnisa & Kunci, n.d.) . Didorong oleh *fraksionalisasi kepartaian* dan *personalisasi elite partai*—di mana keputusan komisi/fraksi di parlemen sangat ditentukan oleh instruksi pimpinan puncak partai politik—RUU IKN berhasil disahkan dengan dukungan **8 dari 9 fraksi di DPR RI**: PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat (Khairunnisa & Kunci, n.d.).

Meskipun mendapat dukungan mayoritas mutlak, dinamika di parlemen tetap menyisakan spektrum perbedaan (Ikfina, 2024). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang secara tegas menolak RUU IKN, dengan argumen bahwa kebijakan tersebut terburu-buru dan tidak tepat dilakukan di tengah pemulihan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 serta besarnya beban fiskal negara (Khairunnisa & Kunci, n.d.). Di sisi lain, Partai Demokrat menerima RUU tersebut dengan memberikan catatan kritis (*notes*) terkait perlindungan lingkungan hidup, perlindungan hak-hak warga lokal dari ancaman marjinalisasi, serta jaminan keberlanjutan fiskal (Ikfina, 2024).

Dinamika Aktor dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Dinamika aktor pasca-pengesahan UU IKN memperlihatkan kontestasi wacana dan kepentingan yang melibatkan elite politik, sektor swasta, akademisi, masyarakat adat, hingga publik luas di media sosial (Tri et al., 2024). Proyek pemindahan ibu kota merupakan kebijakan jangka panjang yang membutuhkan stabilitas politik dan konsistensi kepemimpinan lintas periode. Literatur menunjukkan bahwa keberlanjutan IKN sangat tergantung pada komitmen pimpinan nasional pasca-2024 dan komposisi partai pendukung di parlemen. Menjelang transisi kepemimpinan 2024, konstelasi politik elite membelah ke dalam poros yang mendukung keberlanjutan program (koalisi pemerintah) dan poros yang mengusung narasi perubahan/evaluasi kebijakan. Hal ini menuntut adanya kepastian hukum (*legal certainty*) dan kejelasan regulasi agar proyek strategis nasional tidak mengalami kemangkrakan di tengah transisi kekuasaan.
Respons aktor pasar dan sektor swasta tercermin dari pengajuan sekitar 200 *Letter of Intent* (LOI) yang mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, energi, teknologi, perumahan, dan pendidikan. Namun, sebagian investor masih mengambil sikap *wait and see* guna memastikan kepastian hukum serta prospek keberlanjutan pasca-2024. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil dan para kritikus mengidentifikasi adanya dominasi kepentingan oligarki dalam kebijakan IKN. Kebijakan ini dikritik karena dianggap berpotensi memberikan kompensasi politik atau keuntungan ekonomis bagi pemegang konsesi lahan, pertambangan, dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Kalimantan Timur.

Tinjauan terhadap partisipasi masyarakat menunjukkan adanya persoalan *meaningless participation* atau partisipasi publik yang minim dan sebatas formalitas prosedural dalam pembentukan UU IKN (Aprilliani et al., 2024). Kelompok masyarakat adat (seperti Suku Balik, Paser, dan Dayak) di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menghadapi ketakutan akan ancaman alih fungsi lahan ulayat, penggusuran situs budaya leluhur, serta kecemasan terpinggirkan dari pembangunan. Lembaga pendamping dan akademisi menekankan pentingnya penerapan prasyarat substantif dan partisipatif untuk menjamin perlindungan hak atas tanah, mitigasi dampak negatif sosial-ekologis, serta pengakuan hukum atas wilayah adat (Nugroho, 2022).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Analisis terhadap wacana publik digital di media sosial Twitter/X memperlihatkan dinamika pertarungan narasi antara kelompok pro dan kontra. Narasi pendukung (seperti tagar #IKNPemerataanEkonomi dan #IKNSejahterakanIndonesia) mendominasi ruang perbincangan dengan menggarisbawahi potensi pembangunan Indonesia-sentris, pengurangan kesenjangan Jawa dan luar-Jawa, serta pemulihan beban Jakarta (Ikfina, 2024). Sebaliknya, narasi penolak (seperti tagar #TolakIbuKotaBaru dan #PindahIbukotauntuksiapa) menyoroti isu ketimpangan alokasi anggaran di masa pemulihan pandemi, ancaman kerusakan ekologis/deforestasi hutan Kalimantan, serta kekhawatiran keterbebanan APBN.

Dari uraian di atas menyimpulkan bahwa perumusan kebijakan pemindahan IKN berhasil diakselerasi berkat kombinasi kuatnya *political will* pimpinan eksekutif dan efektivitas koalisi kartel di parlemen. Namun demikian, dalam aspek implementasi dan legitimasi sosio-politik jangka panjang, kebijakan ini menghadapkan pemerintah pada tantangan serius terkait pemenuhan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta pengelolaan risiko fiskal dan ekologis yang berkelanjutan.

METODE

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang merupakan kebijakan strategis dan kompleks, serta melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, pengaruh, dan peran yang berbeda. Studi kasus memungkinkan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses kebijakan, dinamika antaraktor, serta konteks politik dan kelembagaan yang melatarbelakangi pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota negara. Fokus penelitian diarahkan pada proses kebijakan pemindahan ibu kota negara pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya sejak pengumuman resmi pada tahun 2019 hingga tahap awal implementasi kebijakan pembangunan IKN.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary research*). Data yang digunakan meliputi: (1) dokumen resmi pemerintah, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, pidato kenegaraan, dokumen perencanaan pembangunan, serta dokumen terkait pembangunan IKN; (2) dokumen dan publikasi lembaga negara, termasuk dokumen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, serta kementerian dan lembaga terkait; (3) artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu mengenai kebijakan pemindahan ibu kota, pembangunan wilayah, kebijakan publik, serta relasi antaraktor dalam proses kebijakan; dan (4) pemberitaan media nasional dan sumber informasi kredibel yang memuat perkembangan kebijakan, pernyataan aktor, respons masyarakat, serta dinamika politik yang berkaitan dengan pemindahan IKN.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang dipadukan dengan analisis tematik. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan pemindahan IKN, kepentingan yang dibawa oleh masing-masing aktor, serta bentuk peran dan pengaruhnya dalam proses perumusan

*Corresponding author
E-mail addresses: diah.ditara88@gmail.com



dan implementasi kebijakan. Aktor penelitian mencakup aktor negara maupun non-negara, antara lain Presiden dan pemerintah pusat, DPR, pemerintah daerah, lembaga negara, kelompok masyarakat, akademisi, sektor swasta, serta kelompok kepentingan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemindahan IKN. Data dianalisis dengan mengidentifikasi pola hubungan, posisi, kepentingan, sumber pengaruh, dan kontribusi masing-masing aktor dalam setiap tahapan kebijakan.

Teknik keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen pemerintah, dokumen legislatif, publikasi akademik, serta pemberitaan media. Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi mengenai keterlibatan, posisi, dan peran masing-masing aktor dalam proses pemindahan IKN. Selain itu, perbandingan antarsumber digunakan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan perspektif atau kepentingan dalam pemberitaan dan dokumen kebijakan.

Secara temporal, penelitian difokuskan pada periode 2019 hingga tahap awal implementasi pembangunan IKN, dengan titik awal pada penyampaian rencana pemindahan ibu kota negara oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019. Periode tersebut dipilih karena menandai perubahan dari wacana pemindahan ibu kota yang telah muncul pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya menjadi kebijakan yang secara konkret memasuki tahap perencanaan, pembentukan regulasi, penganggaran, dan pembangunan. Pembatasan periode penelitian memungkinkan penelitian untuk menganalisis secara lebih terfokus dinamika aktor dan proses kebijakan dalam merealisasikan pemindahan ibu kota negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aktor Eksekutif (Pemerintah) Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Baru

Salah satu aktor utama memiliki peranan besar dalam merealisasikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan adalah pemerintah (eksekutif) khususnya peran Presiden Joko Widodo yang telah menegaskan keputusan ibu kota negara baru akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dalam Pidato Kenegaraan di tahun 2019. Mengutip dari sejumlah dokumen, diketahui sejumlah alasan dari pemerintah sendiri yang ingin memindahkan ibu kota negara Jakarta didasarkan, karena, sebanyak 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, rendahnya kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB Nasional yang tidak merata, tingginya potensi krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur, aktivitas konversi lahan terbesar masih terpusat di Pulau Jawa, dan peningkatan pertumbuhan urbanisasi yang masih terkonsentrasi hanya di Jakarta atau di Jabodetabek, serta tingginya potensi penurunan daya dukung lingkungan beriringan dengan indikasi besarnya kerugian ekonomi yang berdampak pada masyarakat dan negara.[5]

Sementara, terdapat lima alasan utama dipilihnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai ibu kota negara baru oleh pemerintah, antara lain, pertama, karena risiko bencana yang minim seperti bencana banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, letusan gunung api, dan tanah longsor. Kedua, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai strategis karena berada di tengah Indonesia. Ketiga, pemilihan lokasi ibu kota negara baru yang berdekatan

[5] https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-832923288/simak-6-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-negara-indonesia-dari-jakarta-ke-kalimantan-timur. Diakses pada 27 November 2021

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



dengan wilayah berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda sehingga akan lebih memudahkan pembangunan. Keempat, lokasi merupakan daerah dengan lahan kosong yang luas sehingga pembangunan fasilitas di lokasi baru akan mumpuni dengan infrastruktur yang relatif lengkap mulai dari jalan tol hingga bandara taraf internasional. Kelima, kepemilikan lahan adalah milik pemerintah seluas 180 ribu hektare sehingga tidak akan memberatkan pemerintah dalam urusan pembebasan lahan atau tanah.[6]

Selanjutnya, penjelasan pemerintah telah menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara bari akan mengusung konsep *modern, smart, and green city,* memakai energi baru dan terbarukan. Secara terbuka mengenai anggaran, pemerintah juga menegaskan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jumlah besar, melainkan akan memanfaatkan jaringan kemitraan melalui dorongan partisipasi dari pihak swasta, BUMN, maupun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dikutip dari CNBC Indonesia, berdasarkan dokumen RPJM 2020-2024, pembangunan ibu kota negara baru akan memakan biaya Rp 466,98 triliun dimana porsi pembiayaan dari APBN hanya akan sekitar 19% dan sisanya sekitar 81% akan dilakukan bersama investor swasta. Setidaknya, terdapat empat kementerian yang memegang kendali atas anggaran pembangunan ibu kota negara baru, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, dan Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang).

Dalam dokumen *master plan* ibu kota negara baru yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pemindahan ibu kota negara ditargetkan dimulai dari tahun 2022 dan akan selesai pada 2045. *Master plan* ini memuat rancangan pembangunan secara menyeluruh sampai pengembalian fungsi penghijauan, termasuk menegaskan bahwa pembangunan ibu kota negara merupakan *game-changer* bagi perekonomian Indonesia yang akan menyerap sampai 13 ribu tenaga kerja dalam proses implementasinya. Dalam hal ini jelas, tujuan pemerintah berdasar pada kepentingan ekonomi Indonesia di masa saat ini dan di masa depan.

Seiring pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2020, sikap pemerintah dalam rencana pemindahan ibu kota negara baru menjadi terhambat karena pemerintah melakukan *refocusing* alokasi anggaran negara untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sehingga pembangunan ibu kota negara baru menyesuaikan dengan perkembangan pandemi Covid-19. Berdasarkan informasi dari sejumlah berita terbaru, pemerintah akan melakukan percepatan target pemindahan ibu kota negara baru sebelum Pilpres tahun 2024, sekaligus menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 mendatang, pemerintah menargetkan kegiatan pembangunan infrastruktur dapat dimulai sembari menunggu Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan yang kini telah diajukan pemerintah kepada DPR RI.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka pemerintah merupakan aktor utama yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Dalam hal ini, terdapat sejumlah catatan kritis terkait peran pemerintah, *pertama*, pemerintah sudah cukup informatif dalam menyampaikan agenda pemindahan ibu kota negara baru kepada publik atau masyarakat. Akan tetapi, proses komunikasi publik ini tidak dijalankan

[6] https://nasional.tempo.co/read/1240383/lima-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur/full&view=ok Diakses pada 27 November 2021

*Corresponding author
E-mail addresses: diah.ditara88@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



secara transparan. Hal ini dapat dilihat dari masih sulitnya dokumen resmi rencana pemindahan ibu kota negara baru yang dapat diakses oleh publik, apalagi agenda ini tidak juga diiringi dengan pola sosialisasi yang partisipatif bersama masyarakat. Selain itu, sejauh ini pemerintah belum secara profesional membuka kajian pemindahan ibu kota negara baru sehingga sisi urgensi dan dampak positif dari agenda ini belum optimal tersampaikan kepada publik. Sejumlah kekurangan dalam komunikasi publik yang dijalankan oleh pemerintah ini tentunya memperkuat model elit dalam penetapan kebijakan pemindahan ibu kota negara baru.

Kedua, adanya percepatan realisasi pemindahan ibu kota negara baru yang sebelumnya ditargetkan pada tahun 2045 menjadi tahun 2024 oleh pemerintah menunjukkan bahwa kendali mega proyek ibu kota negara baru ini menjadi sebuah agenda politik untuk kepentingan sebagian kelompok khususnya elite dan bukan untuk kepentingan masyarakat luas. Bahkan, sebagian kelompok masyarakat menilai bahwa pemindahan ibu kota negara baru sebagai wujud keinginan atau warisan yang hendak dilakukan Presiden Joko Widodo dalam masa jabatannya. Tentunya langkah ini memicu perdebatan publik, mengingat Indonesia masih berusaha keluar dari situasi darurat kesehatan dan pelemahan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Ditambah, situasi keuangan negara yang masih minim karena tingginya utang Indonesia dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu agenda mega proyek yang rawan untuk dikorupsi dan mangkrak. Keputusan pemerintah dalam hal ini masih belum mencerminkan kepentingan dan resiko yang akan berdampak pada masyarakat luas, melainkan hanya mengakomodir kebutuhan dan kepentingan pemerintah dengan alasan percepatan pembangunan, serta pemulihan dan pemerataan ekonomi. .

Ketiga, berdasarkan kronologis rencana pemindahan ibu kota negara baru dari sisi eksekutif ini tidak ditemukan pelibatan lembaga negara lainnya seperti DPR dan DPD, bahkan masyarakat secara transparan dan akuntabel khususnya dalam proses penentuan lokasi ibu kota negara baru hingga perubahan target pemindahan ibu kota negara baru pada 2024 mendatang. Maka, peran eksekutif dalam hal ini menjadi begitu dominan dan strategis sebagaimana konsep model elite yang disampaikan oleh Dye.

Peran Aktor Legislatif (DPR) dalam Pemindahan Ibukota Negara Baru

Pemindahan ibu kota negara baru merupakan perubahan besar yang hendak dituju oleh Pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Guna merealisasikan pemindahan ibu kota negara baru ini, maka diperlukan regulasi atau undang-undang yang mengatur sebagai payung hukum mega proyek ini dapat dimulai. Untuk itu, pemerintah telah memasukan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) sebagai landasan bagi pemindahan ibu kota negara baru. Sehingga, menarik untuk disoroti peranan aktor- aktor legislatif dalam menangani persoalan pemindahan ibu kota negara baru khususnya bagaimana peran DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas untuk melakukan *check and balance* bagi pemerintah atau eksekutif.

Dalam lembaga legislatif diketahui Komisi II DPR RI yang terdiri dari 9 fraksi partai dengan 49 orang anggota merupakan mitra kerja pemerintah dalam menangani pemindahan ibu kota negara baru. Selanjutnya, dinamika politik Komisi II DPR RI dalam pemindahan ibu kota negara baru diidentifikasi dari sikap sejumlah partai politik yang beragam. *Pertama,* PDIP sebagai partai yang sekarang mendominasi DPR RI mendukung sikap pemerintah untuk memindahkan ibu kota

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



negara baru. Pernyataan ini diberikan oleh Andreas Hugo Pareira.[7] Lebih jauh, Megawati Soekarno Putri memberikan penekanan agar dibentuk Tim Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara untuk mengurusi isu-isu strategis yang akan muncul dengan pemindahan ibu kota negara baru. Selain itu, Partai Golkar memberikan pernyataan siap membantu pemerintah meloloskan RUU Ibu Kota Negara (IKN) apabila telah diserahkan ke DPR RI. Ace Hasan Syadzily sebagai anggota Partai Golkar juga memberikan pernyataan siap untuk melakukan lobi-lobi agar RUU IKN dapat lolos.[8]

Partai Gerindra secara umum mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur. Adapun beberapa poin yang harus dikritisi yakni persoalan aspek *opportunity cost* dan *financial cost* dalam realisasi pemindahan ibu kota negara baru.[9] Kemudian, hal lain yang juga turut diperhatikan ialah mengenai isu budaya dan geopolitik kedepan. Sementara, Partai Nasdem juga mendukung rencana pemerintah ini melalui Johnny Plate sembari mengingatkan pemerintah agar pemindahan ibu kota negara baru jangan sampai mengganggu agenda pelayanan publik.[10]

Selanjutnya, Partai PKS menanggapi pemindahan ibu kota negara baru dengan menekankan perlunya agenda ini berjalan sesuai dengan prosedur, seperti terlebih dahulu pemerintah harus mempersiapkan RUU dan Naskah Akademik, pernyataan ini disampaikan oleh Mardani Ali Sera.[11] Partai Demokrat sendiri memberikan tanggapan bahwa agenda pemindahan ibu kota negara baru memerlukan banyak pertimbangan, khususnya mengenai pembangunan beserta pemindahan jutaan pegawai. Oleh karenanya, Partai demokrat belum menentukan sikap, sebelum RUU dan Naskah Akademik diserahkan pemerintah.[12]

Sedangkan, Partai PAN dengan tegas menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara baru belum tepat untuk dilakukan. PAN melihat sebaiknya pemerintah lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan mengeluarkan anggaran yang besar untuk pemindahan yang akan berimbas dengan membengkaknya anggaran negara, pernyataan ini disampaikan oleh Yandi Susanto.[13] Selain itu, Partai PKB menyatakan mendukung dan mendorong agar RUU dan Naskah Akademik terkait pemindahan ibu kota negara baru segera dibahas di DPR RI.[14] Terakhir, Partai PPP melihat sudah sewajarnya ibu kota negara baru pindah, sebab Jakarta sudah tidak lagi kuat untuk mendukung kegiatan bisnis dan pusat pemerintahan. PPP juga menekankan agar DPR membentuk Panitia Khusus Untuk mengkaji RUU IKN ini.[15]

Jika melihat pernyataan yang diberikan oleh partai politik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka mendukung untuk pemindahan Ibu kota negara baru. Adapun

[7] https://nasional.kompas.com/read/2019/09/02/12343701/peta-sikap-partai-politik-soal-rencana-pemindahan-ibu-kota-ke-kaltim?page=all. Diakses pada 27 November 2021
[8] *Ibid.* Media Online: Kompas.
[9] https://www.cnbcindonesia.com/news/20190827092213-4-94945/ini-4-catatan-prabowo-merespons-pemindahan-ibu-kota. Diakses pada 27 November 2021
[10] https://www.beritasatu.com/nasional/425059/fraksi-nasdem-pemindahan-ibukota-negara-sah-saja-asal-semua-syarat-dipenuhi. Diakses pada 27 November 2021
[11] *Loc. It.* Media Online: Kompas.
[12] *Ibid.* Media Online: Kompas. Diakses pada 27 November 2021
[13] *Ibid.*
[14] *Ibid*
[15] *Ibid*

*Corresponding author
E-mail addresses: diah.ditara88@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



komposisi elite dalam Komisi II DPR RI, antara lain PDIP 11 orang, Partai Golkar dan Gerindra 7 orang, Partai Nasdem 6 orang, Partai Demokrat dan PKS terdiri 5 orang. Dalam hal ini, elite DPR melalui Komisi II yang diketuai oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung dari fraksi Golkar secara terbuka telah menunjukkan sikap untuk siap membantu meloloskan RUU IKN agar pemindahan ibu kota negara baru dapat dengan cepat dilaksanakan.

Peran Aktor Masyarakat Sipil Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Baru

Pemindahan ibu kota negara baru ke pulau Kalimantan, tepatnya ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil sebagai *counterweight,* mencela sifat *unilateral* dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah karena tidak berkonsultasi atau melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sipil (LSM) mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali agenda pemindahan ibu kota negara baru dengan penekanan pada aspek ekonomi dan lingkungan dari kebijakan ini.

Faktanya, proyek ibu kota negara baru ini diperkirakan mencapai 32 miliar dolar AS dan perhitungan pemerintah memastikan bahwa proyek ini bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Bagi beberapa peneliti, pemindahan ibu kota Indonesia hanya akan meningkatkan 0,0001% Produk Nasional Bruto (PDB).[16] Dengan pandangan tersebut, Koalisi Gerakan Bersihkan Indonesia memandang proyek Presiden Joko Widodo sebagai aksi bagi-bagi proyek dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu 2019.[17] Sebenarnya, koalisi tersebut mempertanyakan motivasi nyata di balik proyek ini. Apakah benar-benar masyarakat yang menerima manfaat utama, atau perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek konstruksi ini? Menurut Jaringan Advokasi Tambang Merah (Jatam), proyek ini diibaratkan sebagai komoditas politik yang berpihak pada pengusaha dan pendukung pemerintah.

Merujuk pada aktivis lingkungan, mereka adalah penentang utama proyek pemindahan ibu kota negara baru ini. Sebenarnya, organisasi-organisasi yang memperjuangkan perlindungan lingkungan berpendapat bahwa kebijakan ini bukanlah solusi yang *sustainable*. Pemerintah dituduh menyelesaikan bencana lingkungan (banjir dan tenggelamnya Jakarta) dengan menciptakan bencana lain karena Pulau Kalimantan terancam deforestasi dan mengalami masalah banjir yang diprediksi akan sama dengan Jakarta karena pembangunan jalan dan infrastruktur di kawasan ini berisiko terhadap ekosistemnya.

Oleh karena itu, koalisi beberapa LSM dan aktivis yang bergerak di bidang lingkungan seperti Forest Watch Indonesia, Trend Asia, atau pun Jatam Walhi merekomendasikan untuk membatalkan agenda pemindahan ibu kota negara baru ini. Mengenai masalah tersebut, Ketua Bidang Advokasi Nasional Walhi Zenzi Suhadi[18] mengatakan bahwa kawasan yang direncanakan menjadi ibu kota negara baru di Kalimantan Timur merupakan kawasan yang berisiko dari bencana. Hasil studi tiga bulan yang dilakukan oleh koalisi yang dicantumkan di atas menunjukkan bahwa lokasi ibu kota baru ini di masa depan akan rentan terhadap kebakaran hutan, gempa bumi, dan tsunami.

[16] https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/cadre_gestion/guide_elaboration_politiques_publiques.pdf
[17] *Ibid*
[18] https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/7-pays-qui-ont-change-de-capitale-1212812

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Merujuk pada sikap kelompok masyarakat sipil diatas maka diketahui pula bahwa dalam proses perumusan dan formulasi kebijakan pemindahan ibu kota negara baru minim partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah dalam hal ini tidak melibatkan unsur masyarakat, terutama LSM dan aktivis penggiat lingkungan misalnya seperti menggelar diskusi dan rapat dengar pendapat. Untuk itu, kelompik LSM dan penggiat lingkungan menolak keras kebijakan ini. Apalagi, bagi LSM kebijakan pemindahan ibu kota negara baru ini tidak didukung dengan kajian dan analisis yang mendalam sehingga apa yang dilakukan oleh Bappenas dan aktor pemerintah lain belum matang dan subjektif. Fenomena ini menunjukkan bahwa elite pemerintah mendominasi arah kebijakan tanpa memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi mengenai pemindahan ibu kota negara baru.

Studi Komparatif Dari Negara Yang Berhasil Memindahkan Ibu Kota Negara (Brazil, Malaysia, DLL)

Terdapat sejumlah faktor yang dapat menjelaskan keputusan suatu negara memindahkan ibu kota negaranya, sebagaimana Negara di Afrika yakni Burundi yang pada 2018 lalu memutuskan untuk memindahkan ibu kota negaranya ke Gitega guna memisahkan kekuatan yang dikonsentrasikan Bujumbura yang juga menjadi kubu oposisi politik Burundi.[19] Selain itu, ada pula Malaysia yang sukses memindahkan ibu kota negaranya ke Putrajaya dimana Putra Jaya merupakan kota hijau yang berhasil menarik investor dan bisnis melalui *tax benefit policies*.[20]

Mengenai kasus Jakarta, contoh Brasilia memungkinkan untuk mengamati perbandingan keputusan ini karena ada kesamaan terutama dalam model perkotaan dan tujuan yang mengarah pada rencana pemindahan ibu kota negara baru. Faktanya, Jakarta adalah ibu kota terpadat di Asia Tenggara.[21] Seperti disebutkan sebelumnya, megalopolis ini menghadapi beberapa tantangan, antara lain kelebihan penduduk akibat urbanisasi yang cepat dan menyebabkan masalah terkait pemanasan iklim seperti banjir, polusi udara, dll. Selain itu, ada juga masalah kebijakan lokal yang menyebut Jakarta lebih diperhatikan dan mengabaikan pembangunan daerah lain.

Oleh karena itu, bagian ini menyoroti, di satu sisi, persoalan serupa antara Jakarta dan Rio de Janeiro dan, di sisi lain, perlu juga mengamati kondisi dan tantangan dialami oleh Brasil saat ini untuk menyatakan keobyektifan aktor dalam formulasi kebijakan publik ini.

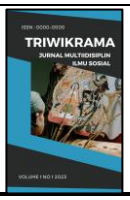
1. Persamaan

Seperti proyek ibu kota negara baru, pemindahan Ibu Kota Brasil pada tahun 1960 merupakan *political will* untuk meningkatkan daerah pedalaman dan memperkuat persatuan nasional. Oleh karena itu, Brasilia diambil sebagai model utama karena memiliki beberapa kesamaan dengan kasus Indonesia. Bahkan, Brasil, yang ibu kotanya pindah dari Rio de Janeiro ke Brasília pada 21 April 1960 telah beberapa kali dikutip oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia "Bappenas" dengan menyoroti keberhasilan relokasi Brasilia khususnya aspek ekonomi. Jakarta dan Rio de Janeiro sama-sama kota besar yang *overpopulation*. Oleh karena itu, titik-titik konvergensi tertentu dapat diamati dalam alasan pemindahan ibu kota negara baru yaitu demi keseimbangan nasional, demografis, dan ekonomi.

[19] *Ibid*
[20] https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/7-pays-qui-ont-change-de-capitale-1212812
[21] https://statistik.jakarta.go.id/berapa-kepadatan-penduduk-dki-jakarta-saat-ini/

*Corresponding author
E-mail addresses: diah.ditara88@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



- Aspek geografis merupakan ciri umum antara kedua proyek ini. Pertama, jarak antara ibukota lama (Rio de Janeiro dan Jakarta) dan lokasi baru cukup signifikan. Brasilia adalah dataran tinggi di sabana Goiás, terletak di ketinggian 1.000 meter dan terisolasi di dalam wilayah Brasil.[22] Kedua, pemindahan ibu kota ke pulau yang telah lama diabaikan bertujuan untuk mendorong dan menyeimbangkan pembangunan di pulau-pulau terpencil tersebut. Argumentasi ini juga disebutkan dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara 16 Mei 2019 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.[23] Sebernarnya, pemilihan pulau Kalimantan mempertimbangkan perhitungan mengenai letak yang strategis, secara geografis karena pulau ini berada di tengah wilayah Indonesia yang akan memungkinkan untuk mewakili keadilan dan mendorong percepatan pembangunan wilayah Indonesia Timur.
- Relokasi ibukota Brasil berhubungan dengan keinginan untuk mendesentralisasikan dan pembangunan kota-kota terpencil. Oleh karena itu, tujuan desentralisasi ini juga merupakan salah satu alasan di balik proyek Indonesia. Merujuk pada desentralisasi Indonesia, tampak bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia telah berlangsung sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999[24] tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu tujuan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah dengan konstituennya sehingga pelayanan pemerintah dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien. Namun kondisi saat ini, menunjukkan bahwa pendanaan pembangunan daerah masih sangat bergantung pada alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli daerah (PAD) justru lebih rendah. Menurut UU No 22 Tahun 1999, desentralisasi di bidang anggaran terutama berlaku pada sisi pengeluaran.[25] Oleh karena itu, meskipun daerah sekarang dapat memutuskan bagaimana mengalokasikan anggaran mereka, mereka belum menerima kekuatan pengumpulan pendapatan baru. Akibatnya, daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk sumber pendanaannya.

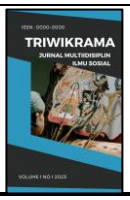
2. Tantangan Saat Ini di Brasilia

Tantangan tersebut antara lain:

- **Aspek sosial ekonomi.** Aspek ekonomi sering digunakan untuk mendorong keberhasilan ibu kota negara baru Brasil. Namun, sejatinya terjadi nilai-nilai ekstrim atas ketimpangan internal yang kuat dan kesenjangan pendapatan tertinggi. Kelas sosial termiskin tidak mendapat perlindungan dalam hal kesehatan dan sosial dan ditolak di pinggiran kota. Saat ini, Kota Brasilia hanya ditempati oleh elit, pejabat senior yang mendapat manfaat dari fasilitas sosial. Akan tetapi ibukota baru ini hanya mewakili sebagian kecil dari populasi Brasilia-metropole, yang diperhitungkan dengan delapan kota satelitnya (1.300.000 penduduk) dan menempatkannya di peringkat nasional ke-9.[26] Faktanya, ketika merujuk pada indeks Gini terbaru yang diterbitkan oleh Bank Dunia untuk setiap negara, Brasil adalah negara ke-10 yang paling tidak setara di dunia dari 158 negara.[27] Oleh karena itu, elemen-elemen ini tidak boleh diabaikan ketika contoh Brasilia dianggap sebagai simbol kesuksesan politik dan ekonomi karena perlu disadari bahwa pembangunan Brasilia telah meningkatkan utang negara dan menyebabkan inflasi.[28]

[22] https://www.herodote.net/21_avril_1960-evenement-19600421.php
[23] DIALOG NASIONAL VI IKN "Menuju Ibu Kota Negara Lestari dan Berkelanjutan"
[24] https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/23360/pdf
[25] Usman, Syaikhu. "Indonesia's decentralization policy: Initial experiences and emerging problems." (2001)
[26] Heuzé, Claire. "BMI~ RGENCE D'UNE CIAPITALE, BRASILIA." *Cah. Sci. Hum* 22.3-4 (1980): 429-442.
[27] https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=BR
[28] https://www.courrierinternational.com/article/bresil-brasilia-limpossible-utopie

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



- **Aspek lingkungan** menyoroti risiko eksploitasi sumber daya dan tantangan melindungi ruang hijau dan spesies langka. Pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan secara serius dapat mengancam hutan tropis terbesar ketiga di dunia, yang telah menjadi korban deforestasi intensif. Pulau Kalimantan hanya mewakili 1% dari daratan dunia, tetapi memiliki sekitar 6% keanekaragaman hayati di hutan tropisnya yang sangat kaya.[29] Brasilia saat ini menghadapi masalah lingkungan, pembangunan jalan dan bandara baru, pendirian industri kapal, dll., telah menyebabkan degradasi lahan yang menjadi kedap air karena menjamurnya subdivisi perkotaan. Sejak tahun 1980-an, telah terjadi pembentukan aliran deras, banjir, erosi tanah di seluruh wilayah Distrik Federal tetapi terutama di *satélite cideades*. Brasilia saat ini terkena banjir dan erosi karena tutupan vegetasi alami di daerah tersebut hancur.[30]

Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa agenda pemindahan ibu kota negara baru dan ibu kota negara Brasilia sama-sama merupakan keputusan *unilateral* untuk membangun ibukota baru yang berasal dari Presiden. Kedua proyek ini sepenuhnya melibatkan para elit, contohnya saat ini di Brasilia, pejabat seniornya telah menjadi penghuni utama kota baru ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan Saran:

Dari sejumlah pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sejak awal perumusan hingga tahap persiapan pemindahan ibu kota negara ini merupakan sebuah *top-down* dengan model elite. Hal ini dapat dilihat dari prefensi dan dominasi pemerintah dalam pembuatan kebijakan sebagai elite yang berkuasa. Dalam artikel ini, diidentifikasi terdapat tiga aktor yang terlibat, *pertama*, aktor pemerintah yakni sebagai penggagas kebijakan dimana Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara yang mengkomandoi arah penetapan pemindahan ibu kota negara baru. *Kedua*, aktor legislatif yakni DPR RI yang minim dilibatkan dalam proses perumusan bahkan tidak menjalankan fungsi *check and balance* bagi pemerintah. Pernyataan yang dikeluarkan oleh partai-partai yang berada di pemerintahan menunjukkan bahwa DPR RI mendukung kebijakan pemindahan ibu kota negara baru yang diajukan oleh pemerintah. *Ketiga*, aktor *civil society* terlihat jelas tidak dilibatkan dalam proses perumusan sejak awal hingga sampai saat ini kritik keras masih disuarakan mereka khususnya terkait dampak lingkungan dan sosial ekonomi.

[29] https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/borneo
[30] Paviani, Aldo. "La gestion partagée de l'environnement urbain de Brasília: la nouvelle utopie pour demain?."

*Corresponding author
E-mail addresses: diah.ditara88@gmail.com



DAFTAR PUSTAKA

Aprilliani, E. D., Prameswari, P. Z., & Wibowo, A. (2024). Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Analisis Hukum*, *7*(2), 200–208. https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5205

DIALOG NASIONAL VI IKN "Menuju Ibu Kota Negara Lestari dan Berkelanjutan"

Heuzé, Claire. "BMI~ RGENCE D'UNE CIAPITALE, BRASILIA." *Cah. Sci. Hum* 22.3-4 (1980): 429-442.

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=BR

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/23360/pdf

Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota...Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/02/12343701/peta-sikap-partai-politik-soal-rencana-pemindahan-ibu-kota-ke-kaltim?page=all

https://nasional.tempo.co/read/1240383/lima-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur/full&view=ok

https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-832923288/simak-6-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-negara-indonesia-dari-jakarta-ke-kalimantan-timur

https://statistik.jakarta.go.id/berapa-kepadatan-penduduk-dki-jakarta-saat-ini/

https://www.beritasatu.com/nasional/425059/fraksi-nasdem-pemindahan-ibukota-negara-sah-saja-asal-semua-syarat-dipenuhi.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190827092213-4-94945/ini-4-catatan-prabowo-merespons-pemindahan-ibu-kota.

https://www.courrierinternational.com/article/bresil-brasilia-limpossible-utopie

https://www.herodote.net/21_avril_1960-evenement-19600421.php

https://www.its.ac.id/news/2021/10/20/kilas-balik-wacana-pemindahan-ibukota/

https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/7-pays-qui-ont-change-de-capitale-1212812

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/cadre_gestion/guide_elaboration_politiques_publiques.pdf

https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/borneo

Ikfina, M. U. (2024). Indonesia's National Capital Relocation Policy: An Analysis of Political Support in Parliament and the Public Responses on Twitter. *Journal of Governance and Public Policy*, *11*(1), 1–13. https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i1.17760

Khairunnisa, E., & Kunci, K. (n.d.). *Analisis Politik Faktor Keberhasilan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo*.

Nugroho, B. E. (2022). PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA. In *JISIP-UNJA* (Vol. 6, Number 1).

Paviani, Aldo. "La gestion partagée de l'environnement urbain de Brasília: la nouvelle utopie pour demain?"

Romero, Lucas. "Analyzing the Relocation Process of the Indonesian Capital City LucasRomero"https://www.transformasi.org/id/component/attachment/?task=attachment.download&id=96

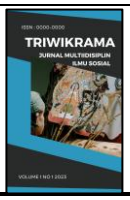
Satriawan, B. H., & Syamsuri, S. (2023). Measuring Political Will and Political Constellation in Moving Indonesia's Capital City Policy. *Jurnal Bina Praja*, *15*(2), 339–356. https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.339-356

Teo, Hoong Chen & Lechner, Alex & Sagala, Saut & Campos-Arceiz, Ahimsa. (2020). Environmental implications of Indonesia's new planned capital in East Kalimantan, Borneo Island.

Thomas Dye, 2017. Understanding Public Policy. Florida State University.

Tri, T. R. R., Hermansyah, Mursak, Muhammad Takdir, & Baharuddin. (2024). Narasi Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia: Analisis Hastags di Twitter. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, *12*(2), 317–330. https://doi.org/10.30656/sawala.v12i2.8846

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Usman, Syaikhu. "Indonesia's decentralization policy: Initial experiences and emerging problems." (2001)
Utama Erry Praditya. (2024). IBLAM LAW REVIEW. *IBLAM LAW REVIEW*, *4*(3). https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.405
Yulianto Kadji, 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas

*Corresponding author
E-mail addresses: diah.ditara88@gmail.com